

**RETROSPEKSI MODEL PENGEMBANGAN MANUSIA
DI DAERAH PEDALAMAN PEGUNUNGAN DAN PERBATASAN
PAPUA – PAPUA NUGINI**

***RETROSPECTION MODEL ON HUMAN DEVELOPMENT
IN MOUNTAINOUS BORDER PAPUA-PAPUA NEW GUENIA
REMOTE AREA***

Pranowo dan Fatwa Nurul Hakim

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan pelayanan Kesejahteraan sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu Yogyakarta Indonesia
Telp. (0274) 377265HP. 08156887587,

Email : pranowo19@yahoo.com, hakim.fatwa@yahoo.com

Naskah diterima 12 Januari 2017, direvisi 2 Februari 2017, disetujui 20 Februari 2017

Abstract

The research did a retrospection on area condition, culture and social, social model service development process with traditional remote community approach. The research took place in Baliem valey, Pegunungan Tengah, Wamena, Jayawijaya Regency and Asto Timor district, Keerom Regency. Data were gathered through interview with informants, ones who considered to know and able to give information related to the goal of the research. Observation and documnetary analysis also conducted to support primary data from interview. The interview reveals that most of the research location, including mountainous border areas, infrastructure development has yet overcome isolation, so people living in remote and isolated areas have not been touched maximally by development. That is why it needs empowerment enhancement, integrated social welfare development with other developments, and traditional remote community model more enhanced in human development.

Keywords: Retrospection, Human Development, Border Areas.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan retrospeksi kondisi daerah, model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG pelayanan sosial dengan pendekatan pemberdayaan komunitas adat terpencil. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Lembah Baliem, Pegunungan Tengah, Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Astro Timur, Kabupaten Keerom. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan informan yang dipilih adalah orang yang dianggap mengetahui dan dapat member informasi terkait dengan tujuan penelitian. Selain itu, observasi dan telaah dokumen juga dilakukan untuk memperkuat data primer hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG belum berjalan secara maksimal, dan dari aspek pengembangan manusia belum menyeluruh kehidupan kesejahteraan di daerah pedalaman hal ini disebabkan sebagian besar daerah di Papua, termasuk yang ada di perbatasan berupa pegunungan, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dapat mengatasi keterpencilan, sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedalaman/terpencil belum secara maksimal tersentuh pengembangan manusia. Oleh sebab itu perlu peningkatan pemberdayaan, dan pembangunan kesejahteraan sosial yang integral dengan bidang lain, dan model pemberdayaan (KAT) lebih ditingkatkan pada pengembangan manusia

Kata Kunci: Komunitas Adat Terpencil, Pengembangan Manusia, Daerah Perbatasan.

A. PENDAHULUAN

UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002, pasal 27 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan komitmen dunia tentang pembangunan sosial tahun 1995 mengamanatkan tentang perlunya upaya ke arah terwujudnya keserasian dan keseimbangan antara pembangunan bidang ekonomi dan bidang sosial dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Setiap negara berkewajiban menerapkannya sesuai situasi dan kondisi sosial yang dihadapi, yaitu melalui kebijakan, strategi dan program pembangunan. Sehubungan hal tersebut, Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan telah menerapkannya melalui konsep atau model pembangunan yang bertumpu pada pengembangan manusia (Depsos, 2002: 1). Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Indonesia telah berupaya melakukan pengembangan manusia dengan menjalankan model *human development*, bahkan pada tahun 1990–2000 pernah mencapai keberhasilan pembangunan. Salah satu kemajuan dimaksud dilihat dari segi meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang ditandai oleh kenaikan pendapatan perkapita dan menurunnya kematian bayi dari 159 menjadi 45 kematian per seribu kelahiran hidup (Kompas, 9 April 2006). Meskipun demikian, keberhasilan pembangunan tersebut belum merata di semua daerah, khususnya di pedalaman pegunungan dan perbatasan antar negara masih tergolong tertinggal.

Mengkaji pengembangan manusia di daerah pedalaman selalu berkait masalah komunitas adat terpencil (KAT), khususnya kehidupan suku terasing yang masih primitif dan rentan terjadi perang suku. KAT merupakan penduduk asli yang mendiami daerah pedalaman terpencil, dikonotasikan sebagai kelompok manusia yang tertinggal, kurang berdaya, serta miskin. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, diantaranya aspek geografi, mereka berada di daerah terpencil pegunungan, hutan belantara, dan kepulauan kecil terluar di tengah laut yang luas. Dari aspek jangkauan pembangunan, kurang tersentuh

pembangunan sumber daya manusia, bahkan menjadi “korban” pendekatan pembangunan yang cenderung kurang berpusat pada manusia (*people centered development*), menjadikan mereka terpinggirkan. Tahun 2012, populasi komunitas adat terpencil di daerah pedalaman Indonesia berjumlah 213.080 KK dengan rincian belum diberdayakan 118.697 KK (55,71persen), telah diberdayakan 88.512 KK (41,54persen), dan masih dalam proses pemberdayaan berjumlah 5.871 KK (2,75persen). (Kemensos 2003:2). Komunitas adat terpencil tersebut berada di 116 lokasi, 93 desa, 92 Kecamatan, 78 Kabupaten di 30 provinsi (Kemensos, 2013: 2). Komunitas adat terpencil merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpecah serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan pelayanan kesejahteraan sosial, ekonomi maupun politik. Pemakaian istilah KAT digunakan berdasarkan Keppres Nomor 111 Tahun 1999, yaitu sebagai pengganti masyarakat terasing yang dipandang oleh sebagian warga masyarakat kurang tepat (Depsos, 2002: 1). Perubahan istilah tersebut juga diikuti perubahan metode pembinaan menjadi pemberdayaan dan pendekatannya. Hal ini dilakukan seiring pergeseran paradigma pembangunan kesejahteraan sosial yang memandang pentingnya pelayanan pengembangan manusia (*human development*) di daerah pedalaman, baik di pegunungan, kepulauan maupun yang berada di kawasan perbatasan antar negara.

Papua merupakan salah satu daerah pegunungan, sebelum otonomi daerah tahun 2001 bernama Provinsi Irian Jaya, luas wilayahnya 4.414 km² atau 47 persen dari luas Pulau Papua adalah wilayah Negara Republik Indonesia, terdiri Provinsi Papua dan Papua Barat. Kondisi daerah, yaitu dari ujung barat tepatnya berada pada garis 135° BT adalah Kabupaten Sorong atau lebih dikenal “Kepala Burung” sampai ujung timur wilayah perbatasan dengan Negara Papua Nugini (PNG) tepatnya pada 141° BT merupakan deretan daerah pegunungan dengan hutan tropis yang lebat, pegunungan dimaksud adalah; (1) di bagian barat dan utara dari Sorong, Manokwari sampai Fak-Fak merupakan deretan pegunungan Arfak dan Tamrau, pegunungan

ini menjorok sampai laut utara (Samudera Pasifik) dan merupakan pegunungan batu karang dengan ketinggian mencapai 3000 meter dari permukaan air laut; (2) bagian utara dari Yapen, Pulau Supiori, Teluk Cenderawasih sampai Kabupaten Jayapura adalah deretan pegunungan Van Rees, Gouter dan Cycloap; (3) bagian tengah hingga perbatasan dengan PNG adalah deretan pegunungan Puncak Jaya memiliki lembah cukup curam yang disebut lembah Baliem berada di Wamena, Jayawijaya. Puncak pegunungan mencapai 5000 meter dari permukaan air laut. Pegunungan tengah ini berderet menyambung dengan pegunungan di Kabupaten Jayapura hingga ke barat sampai Gunung Bintang, Yakohimo, Talikara, dan yang ke utara samapi Kabupaten Keerom, sedang di bagian selatan yaitu Merauke merupakan daerah dataran rendah. Kondisi geografi ini, menjadikan sebagian besar penduduknya bertempat tinggal secara terpencar, dan terdiri berbagai suku dengan kehidupan sosial budaya yang berbeda dan bertempat tinggal di daerah pedalaman. Penduduk ini termasuk kategori komunitas adat terpencil yang tinggal di daerah pegunungan yang terpencil, dan tertinggal apabila tidak mendapat pelayanan sosial melalui pengembangan manusia.

Pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya pengembangan manusia di pedalaman Papua ternyata tidak mudah sebagaimana pembangunan fisik, dan pembangunan di Papua sudah lama dilakukan, bahkan sejak Belanda telah dilakukan ekspedisi, pembangunan yang dilakukan pada waktu itu umumnya pada bidang fisik, geografi, antropologi, turne/perjalanan yang berkaitan dengan patrol:militer yang semuanya kurang menyentuh langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, bahwa pengetrapan pembangunan yang dilakukan di pedalaman kurang tepat dan dalam penyelenggaraan pembangunan terjadi *erroring acculturation*, yaitu proses akulturasi yang salah, dan berkepanjangan akibatnya terjadi dampak negatif berupa kehidupan penduduk yang pasif, apatis dan tertinggal (koentjaraningrat, 1994).

Bertitik tolak dari permasalahan umum, kondisi daerah, dan kebijakan pendekatan pembangunan (model) pemberdayaan masyarakat yang dirasa belum maksimal/merata serta berdampak kurang menyentuh kehidupan masyarakat di pegunungan dan daerah perbatasan Papua-PNG menjadi mendorong dilakukan penelitian dengan judul "Retrospeksi Model Pengembangan Manusia Pedalaman di Pegunungan dan Perbatasan Papua-PNG. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimanakah model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG dilihat dari aspek kondisi daerah, masalah kehidupan sosial budaya dan pembangunan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah diketahui retrospeksi. Model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG yang dilihat dan aspek kondisi daerah, masalah kehidupan sosial budaya dan pembangunan.

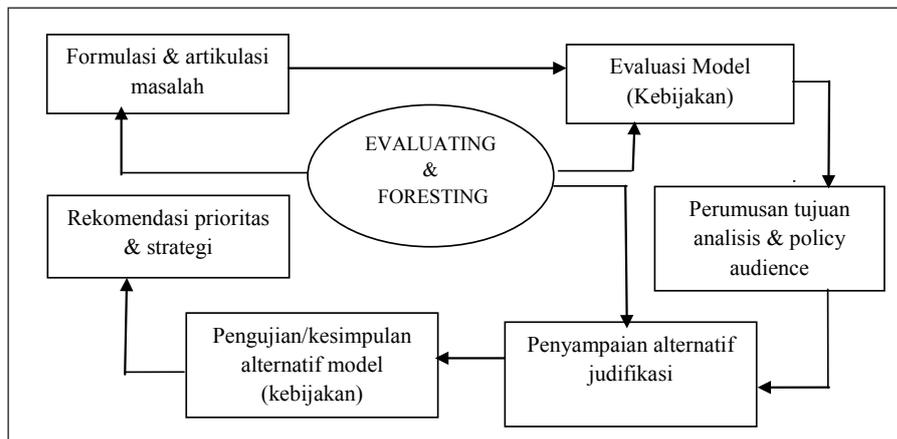
B. METODE PENELITIAN

Penelitian retrospektif study adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif, yaitu melakukan identifikasi efek peristiwa yang telah terjadi di masa lalu untuk mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab. Analisis retrospektif, ini melihat kondisi daerah, suku budaya dan kebijakan pembangunan sosial yang sudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Menurut Arikunto (2000), penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lapangan tempat penelitian dilakukan. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan kondisi realitas daerah, kondisi sosial budaya dan pengembangan model pelayanan sosial di daerah pegunungan perbatasan Papua-PNG.

Penentuan lokasi ditentukan secara *purposive*, yaitu Lembah Baliem, Kecamatan Wamena sebagai sampel daerah pegunungan, dan Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom sebagai sampel daerah perbatasan antarnegara. Alasan pemilihan lokasi, bahwa di dua lokasi

tersebut merupakan daerah lereng/ lembah pegunungan, lembah Baliem di Wamena dijadikan lokasi karena Wamena adalah barometer Papua, ada pameo bagi pengunjung Papua “belum ke Papua kalau belum melihat atau berkunjung ke Wamena” dikatakan demikian karena bisa kita lihat penduduk asli dengan pakaian adat yang menggambarkan kehidupan masa lampau seperti mengenakan *koteka* bagi laki-laki dan *more* atau *Wai* bagi perempuan, dan peralatan perang seperti busur/ anak panah, kampak batu, tombak baik di kampung-kampung, pasar atau museum Wesaput. Sedang Distrik Arso Timur merupakan lembah Pegunungan Keerom yang berbatasan langsung dengan PNG terdapat beberapa pemukiman seperti di Wembi dan Pikere. Dengan dua lokasi tersebut dimungkinkan diperoleh data gambaran daerah, suku dan model pengembangan manusia pedalaman. Sasaran subyek dan obyek penelitian. Sasaran obyek adalah informan para pelaku pembangunan bidang sosial budaya, tokoh dan warga pedalaman pegunungan atau perbatasan. Sedangkan objek penelitian adalah retrospeksi model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG kesimpulan dilakukan dengan

dilakukan terstruktur dengan pertanyaan yang dipersiapkan tertulis sesuai permasalahan penelitian, dan wawancara tidak berstruktur dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan yang terstruktur. Menurut Nasution (2006), untuk mendapat data yang valid, wawancara ditujukan kepada informan yang jelas dan dapat dipercaya. Observasi pengamatan kehidupan sosial budaya dilakukan dipemukiman yang ada di lembah pegunungan, yaitu di lembah Baliem dan daerah perbatasan seperti di Waris dan Kibay di Kabupaten Keerom. Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan (Irawan, 1995) digunakan untuk memperkuat dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Sedangkan telaah dokumen dilakukan untuk memperkuat kebenaran data, pengumpul data bersumber dari arsip dan dokumen yang ada di Distrik Arso Timur, Dinas Sosial Kabupaten Keerom dan sumber lain seperti buku, internet, majalah dan surat kabar. Proses analisis terhadap model (kebijakan) pengembangan manusia mengacu pada pendekatan pemberdayaan KAT di gambarkan sebagai berikut.



Sumber : Harry Hikmat (2006)

melihat kondisi daerah, masalah kehidupan sosial budaya dan pembangunan yang telah terjadi.

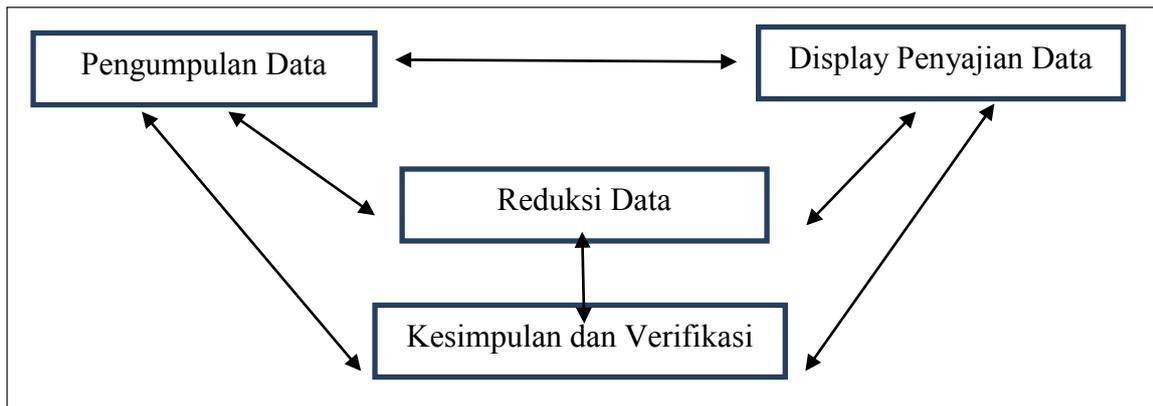
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan beberapa informan dan ditunjang atau diperkuat dengan observasi data sekunder hasil telaah dokumen. Wawancara

Formulasi dan artikulasi masalah menggunakan sudut pandang geografi, antropologi, sosiaologi dan psikologi, sedang evaluasi model (kebijakan) dan perumusan tujuannya melihat model yang telah ada yaitu model pendekatan pemberdayaan KAT, kesimpulan dan rekomendasi pelayanan (model)

pengembangan manusia pedalaman ditarik dari alternatif sesuai rumusan dan *policy audience* berdasarkan data yang ditemui di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif model yang dikembangkan Huberman dan Miles, yaitu menarik kesimpulan dari hasil interaksi data yang dikumpulkan, reduksi dan penyajian data yang digambarkan sebagai berikut.

adalah bulan dengan curah hujan terbesar, sedangkan curah hujan terendah ditemukan pada bulan Juli.

Lembah Baliem dikelilingi oleh Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena puncak-puncak salju abadinya, antara lain: Puncak Trikora (4.750 m), Puncak Mandala (4.700 m) dan Puncak Yamin (4.595 m). Pegunungan ini amat menarik wisatawan



Gambar 1. Model analisis menurut Mattheu B Miles & A. Michael Huberman (dalam Endro Winarno, 2012)

Reduksi data merupakan proses seleksi, penentuan, penyederhanaan, peringkasan dan perubahan bentuk data yang belum diolah dalam catatan, data diolah dari data "mentah" menjadi data "matang" ketajamannya, fokusnya, maknanya, sehingga siap diverifikasi. Display adalah penyajian "pembeberan" data yang telah direduksi untuk ditampilkan secara jelas, tertata, sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Daerah Penelitian

a. Megapura, Desa Asolokabal, Kecamatan Wamena, Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya berada di hamparan Lembah Baliem, sebuah lembah aluvial yang terbentang pada areal ketinggian 1500–2000 m di atas permukaan laut. Temperatur udara bervariasi antara 14,5 derajat Celcius sampai dengan 24,5 derajat Celcius. Dalam setahun rata-rata curah hujan adalah 1.900 mm dan dalam sebulan terdapat kurang lebih 16 hari hujan. Musim kemarau dan musim penghujan sulit dibedakan. Berdasarkan data, bulan Maret

dan peneliti Ilmu Pengetahuan Alam karena puncaknya yang selalu ditutupi salju walaupun berada di kawasan tropis. Lereng pegunungan yang terjal dan lembah sungai yang sempit dan curam menjadi ciri khas pegunungan ini. Cekungan lembah sungai yang cukup luas terdapat hanya di Lembah Baliem Barat dan Lembah Baliem Timur (Wamena).

Vegetasi alam hutan tropis basah di dataran rendah memberi peluang pada hutan iklim sedang berkembang cepat di lembah ini. Ekosistem hutan pegunungan berkembang di daerah ketinggian antara 2.000–2.500 m di atas permukaan laut.

Orang Dani di lembah Baliem biasa disebut sebagai "Orang Dani Lembah". Rata-rata kenaikan populasi orang Dani sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah keengganan pada ibu untuk mempunyai anak lebih daripada dua yang menyebabkan rendahnya populasi orang Dani di Lembah Baliem. Sikap berpantang pada ibu selama masih ada anak yang masih disusui, membuat jarak kelahiran menjadi jarang. Hal ini selain tentu saja karena

adat istiadat mereka, mendorong terjadinya poligami. Poligami terjadi terutama pada laki-laki yang kaya, mempunyai banyak babi. Babi merupakan mas kawin utama yang diberikan laki-laki kepada keluarga wanita. Selain sebagai mas kawin, babi juga digunakan sebagai lambang kegembiraan maupun kedukaan. Babi juga menjadi alat pembayaran denda terhadap berbagai jenis pelanggaran adat. Dalam pesta adat besar babi tidak pernah terlupakan bahkan menjadi bahan konsumsi utama.

Sebelum tahun 1954, penduduk Kabupaten Jayawijaya merupakan masyarakat yang homogen dan hidup berkelompok menurut wilayah adat, sosial dan konfederasi suku masing-masing. Pada saat sekarang ini penduduk Jayawijaya sudah heterogen yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang sosial, budaya dan agama yang berbeda namun hidup berbaaur dan saling menghormati.

b. Arso Timur Kabupaten Keerom

Secara geografis Distrik Arso Timur terletak pada posisi 140°55'41.89" Bujur Timur dan 02°59'10.19" Lintang Selatan. Batas wilayah Distrik Arso Timur sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Muara Tami, di Selatan berbatasan dengan Distrik Waris dan Senggi, di sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Arso, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, dengan wilayah seluas 461,16 km². Kampung Skofro memiliki wilayah terluas (79,96 km²) atau sebesar 17,34 persen dari total luas wilayah pada Distrik Arso Timur. Sedangkan Kampung Wambes merupakan daerah yang memiliki wilayah terkecil dengan luas hanya 7,44 km² atau sebesar 0,16 persen dari total luas Distrik Arso Timur. Kampung Wembi memiliki jarak terjauh dari ibukota distrik, yaitu sepanjang 42 Km dan dengan kendaraan roda 2 berkecepatan rata-rata 40-60 Km/jam dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 40 menit. Sedang jarak terdekat adalah Kampung Yetty, yaitu sejauh 1 Km dan dengan berkendara roda 2 berkecepatan rata-rata 40-60 km/jam dapat ditempuh dengan waktu 5 menit.

Distrik Arso Timur memiliki luas lahan bukan sawah sebesar 1025,9 Ha dan lahan

sawah seluas 40,68 Ha dimana yang terluas berada di Kampung Wonorejo. Ketinggian Distrik Arso Timur berkisar antara 72-134 meter di atas permukaan laut. Pyawi adalah kampung tertinggi dari permukaan laut, sedang yang terendah adalah Kampung Kriku. Berdasarkan catatan dari Balai Meteorologi dan Geofisika, pada tahun 2014 jumlah curah hujan di Distrik Arso Timur sebesar 1271,1 mm dengan rata-rata curah hujan 105,9 hari hujan sepanjang 2014 sebanyak 100 hari.

2. Masalah Kehidupan Sosial Budaya

a. Megapura, Desa Asolokobal, Kecamatan Wamena, Jayawijaya merupakan daerah pegunungan

Sub Suku Dani di daerah pegunungan ada Woko-Dopo, Goham-Dopo, Lani-Dopo, Asolo-Kobal. Di Pegunungan Tengah bagian timur hingga perbatasan PNG yaitu sekitar Jayawijaya terdapat Suku Dani. Suku Dani yang berarti pemberani wilayahnya cukup luas, di bagian barat hingga lembah Baliem di Kecamatan Wamena berbatasan dengan Suku Kurima. Luas wilayah suku tidak sama dengan daerah kecamatan atau kabupaten melainkan berdasarkan penyebaran suku dan hak Wilayah Ulayat tanah yang dikuasai. KAT sub Suku Dani yang bermukim di Lembah Baliem yaitu di Megapura, Asolokobal, Kecamatan Wamena telah berkembang menjadi daerah yang ramai sebagai pusat kegiatan penduduk, kondisi daerah dan budaya tersebut berefek positif yaitu bisa sebagai sumber pengembangan sumber daya manusia, dari observasi di lembah Baliem, suku yang berkonfederasi ada yang mendiami satu wilayah desa seperti Asolokobal menempati Desa Asolokobal di Kecamatan Wamena. Pimpinan suku besar disebut Kepala Suku, di daerah pegunungan sering disebut *Wim Watek*, selain kepala suku ada yang disebut *Kain* yang artinya adalah orang kuat, pemberani, pandai, disegani, terhormat, bijaksana, dan berwibawa, Kain ini dulu merupakan kepala perang.

Kondisi seperti ini membentuk karakter masyarakat, di sisi positif, yaitu sebagai potensi sumberdaya manusia dalam membangun daerah, di sisi negatif yaitu dari aspek antropologi memandang, bahwa pada suku-

suku di daerah pedalaman, potensial terjadi konflik atau perang suku terkait budaya. Perlu diketahui, pertikaian antar suku-suku di Papua telah muncul sebagai perang suku sejak peradaban zaman batu. Pertikaian suku di Papua sudah terjadi dan dimotori oleh kaum laki-laki, hal ini disebabkan dalam struktur kehidupan adat budaya telah dipersiapkan, yaitu dengan adanya jabatan panglima perang. Anak laki-laki Papua sejak lahir telah dipersiapkan adat dan menjalani seleksi alam untuk menjadi seorang prajurit perang (Pemkot Jayapura, 2004: 23). Dengan demikian, orang laki-laki termotivasi untuk menjadi *kain* (orang kuat) yang mampu berperang, dan orang kuat fisik terlebih bisa menduduki seorang panglima, pimpinan atau ketua kelompok mempunyai prestise yang tinggi di komunitasnya.

Menyoal pertikaian suku sebagai masalah sosial karena menjadi celah tumbuhnya masalah sosial tidak hanya korban jiwa manusia, melainkan kerugian materi seperti rumah rusak atau musnah akibat dibakar, hilangnya mata pencaharian, rusaknya kebun/gagal panen. Oleh sebab itu, pertikaian/konflik yang masih sering terjadi di Papua menjadi masalah yang perlu di atasi. Konflik tersebut diterjemahkan dari kata *conflict* yang berarti perkelahian antara beberapa pihak. Pada saat sekarang, konflik di Papua tidak berupa konfrontasi fisik sebagaimana digambarkan di atas, melainkan bisa berarti perjuangan menuntut hak, keadilan dan kesejahteraan sosial berupa demo, tuntutan ganti rugi atau bahkan apatis terhadap pembangunan. Dari aspek psikologi, konflik terjadi dari “ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas beberapa kepentingan, ide dan apresiasi” (Dean Pruit, 2004: 9). Konflik sebagai masalah sosial di Papua yang terjadi dari budaya perang suku penyelesaiannya tidak sederhana hanya peleraian, pola kejadiannya terdiri atas : pemicu kejadian konflik tuntutan pemenuhan keseimbangan dari pihak korban kesepakatan tercapainya keseimbangan perdamaian. Oleh karena itu perlu model pengembangan manusia yang progresif, yaitu memiliki wawasan yang maju atau membangun diri dan masyarakat yang madani.

b. Arso Timur Kabupaten Keerom merupakan daerah perbatasan

Arso Timur di Kabupaten Keerom, Arso berarti taring babi melambangkan suku yang besar dan kuat, wilayah Suku Arso tidak hanya wilayah perbatasan di Kecamatan/ Distrik Arso Timur melainkan sampai ke utara di Muara Tami, ke selatan sampai Waris, ke barat sampai Distrik Arso dan yang ke timur hingga PNG. Di Arso sampai Jayapura, kepala suku sering disebut kepala Keret dan pimpinan adat disebut *Ondoafi*. Daerah perbatasan menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 361 ayat 1 menggariskan, bahwa kawasan perbatasan antarnegara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Daerah sekitar kawasan garis batas darat di Papua-PNG yaitu Skosai, Muara Tami, Ubrud, Arso Timur, Waris, Web, Senggi, Oksibil, Okbibab, Kiwirok, Apmisibil, Bupul dan Merauke. Distrik/Kecamatan Arso Timur merupakan salah satu wilayah perbatasan dengan PNG yang kondisi geografisnya merupakan dataran rendah Pegunungan Tengah yang ada di Kabupaten Keerom sebelah utara, batas-batas wilayah sebelah utara adalah Muara Tami, sebelah barat Kecamatan Arso, selatan Kecamatan Waris dan Senggi sedang sebelah timur adalah Negara PNG. Ketinggian darah antara 72-134 meter, tertinggi ada pada kampung Kibay (134 m), Skofro (104 m), Pyawe dan Kriku (93 m), Yetty (89 m), Sangke (85 m), Wembi (82 m), Waris dan Suskun (72 m), Wonorejo (70 m), dan terendah adalah Yamara (56 m) dari permukaan air laut. Sumber daya alam andalan adalah kelapa sawit dan kayu.

Arso Timur merupakan daerah yang strategis berbatasan dengan PNG, selain bisa tembus melalui jalan lokal (“jalan tikus”) di Kaliasin, juga sudah tembus melalui Skosai Kota Jayapura. Berdasarkan Inpres 06/2015 tentang Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas (BLB), tujuh BLB ini berada di Kalimantan Barat tiga buah, Nusa Tenggara Timur tiga buah, dan di Papua satu buah yaitu di Skosai. Pada tahun 2016 di Skosasi sebagai salah satu kawasan perbatasan yang mempunyai akses jalan darat

sambung dengan PNG telah dibangun sarana fisik pusat kegiatan strategis seperti pusat pertokoan, pasar, telekomunikasi, penginapan, dan sarana ekonomi lainnya. Dari hasil observasi, pembangunan di daerah perbatasan antarnegara di skosai belum mampu secara maksimal kehidupan sosial bagi penduduk asli yang bertempat tinggal di tapal batas dengan negara PNG. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang spesifik kawasan perbatasan antarnegara di wilayah Indonesia yaitu; (1) lambannya pertumbuhan ekonomi dan minimnya pelayanan sosial dasar; (2) minimnya kesediaan energy; (3) keterisolasian karena keterbatasan infrastruktur dasar; (4) belum efektifnya akses terhadap layanan telekomunikasi; (5) belum efektifnya pengembangan pusat kegiatan strategis nasional; (6) banyaknya aktifitas illegal karena minim pengamanan; (7) pengelolaan kawasan perbatasan yang masih mementingkan egosektoral, dan yang sangat mendasar dari permasalahan spesifik di kawasan perbatasan antarnegara yakni rendahnya sumber daya manusia (dalam Endro, 2016: 12). Berdasarkan kondisi ini dipandang perlu adanya model pengembangan manusia di daerah pedalaman yaitu untuk meningkatkan keberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Kepala Suku, Wim Watek, Kain, Keret dan Ondoafi bisa menjadi PSKS yang diandalkan karena merupakan sosok tokoh masyarakat sebagai *key people*, mereka memiliki peran yang kuat yaitu menjadi kunci bisa atau tidaknya suatu perubahan atau pembangunan masuk dalam komunitasnya. Berdasarkan deskripsi wilayah dan suku serta pemimpinnya, suatu pembangunan pengembangan manusia di pedalaman pegunungan dan perbatasan bisa mengalami kegagalan bila tidak memperhatikan kearifan lokal, dan apabila melakukan pembangunan fisik seperti pemukiman tanah sudah selesai dari urusan hak ulayat, sebab berada atau tinggal di atas tanah bukan wilayahnya dianggap pencuri, dan ini menjadi rawan konflik atau rumah dikosongkan karena takut menempati. Hal ini perlu penanganan

pengembangan manusia melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai bidang terkait serta melibatkan tokoh-tokoh adat untuk dapat berperan serta dalam pembangunan.

3. Pembangunan di lokasi penelitian berdasar dari model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG

a. Kondisi daerah dikaitkan dengan kebijakan/model pengembangan manusia

Pembangunan dan kondisi di daerah pegunungan sensitivitas masyarakat terhadap *Kebijakan Top Down Planing*, sangat berpengaruh pada pengetrapan kebijakan pembangunan di Papua memerlukan perencanaan yang tepat, Papua peka terhadap pembangunan dari atas, terutama apabila kebijakan pembangunan terjadi mendadak dan sangat cepat. Problem yang dihadapi, di satu sisi perencanaan dari atas dapat mempercepat perubahan masyarakat tetapi memerlukan proses penyesuaian dan waktu yang lama serta rawan konflik. Di sisi lain, yaitu kalau perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) akan terbentur oleh berbagai keterbatasan dan ketertinggalan sumber daya manusia (SDM). G.O Lang (dalam Koentjaraningrat, 1994: 454) mengemukakan, bahwa perencanaan pembangunan di daerah pedalaman termasuk daerah pegunungan dan perbatasan hendaknya menentukan dua hal lebih dahulu, yaitu dari pembuat keputusan dan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Oleh sebab itu, pembangunan di pedalaman Papua hendaknya mengacu pada empat macam kebijakan dengan pendekatan berdasarkan variabel "tempat" penentuan kebijakan dan variable "volume" atau atas dasar kecilnya dana investasi sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 1
Variabel kebijakan Pembangunan di Daerah Pedalaman Menurut G.O Lang

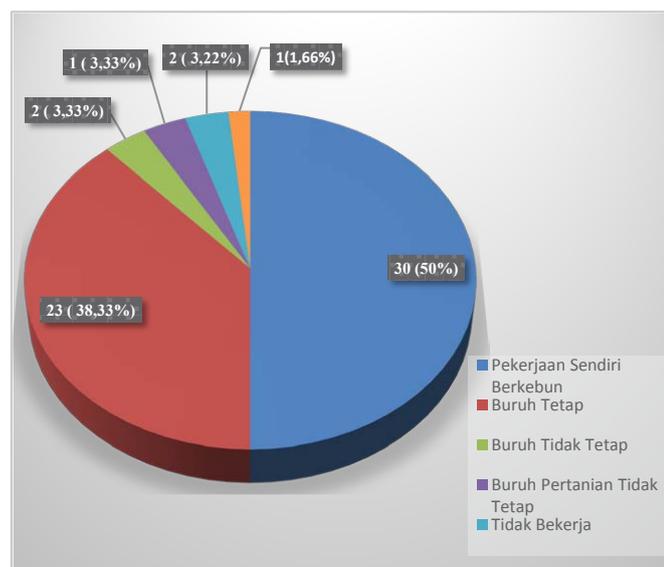
Investasi Model	Pengambilan Keputusan	
	Di Luar Masyarakat Lokal	Di Dalam Masyarakat Lokal
Terbatas	Kebijakan I (pendekatan paternalistik) Pengetahuan dan teknologi tinggi dari luar dengan investasi modal terbatas, memaksakan suatu proyek pembangunan	Kebijakan II (Pendekatan Konvensional) Pengetahuan dan teknologi tradisional dengan sumber daya manusia, pimpinan dan modal dari masyarakat lokal
Besar	Kebijakan III Masukan modal besar, teknologi yang digunakan cukup canggih, memerlukan pembangunan dari atas	Kebijakan IV Melaksanakan pembangunan kombinasi kebijakan II dan III

Pada kebijakan I rawan terhadap timbulnya reaksi negatif berupa sikap pasif, apatis, dan destruktif apabila tidak ada upaya pemberdayaan terlebih dahulu, sebab penerapan kebijakan I kemungkinan besar menimbulkan benturan kebijakan pembangunan dengan kebiasaan adat yang menjadi pegangan dan pola hidup masyarakat setempat.

Kebijakan II, yaitu dengan pendekatan pembangunan konvensional, khususnya

di daerah pegunungan terpencil di wilayah perbatasan, masih sulit diterapkan karena masih terdapat ketertinggalan SDM penduduknya, dan hal ini pada umumnya menyandang keterbatasan sumber modal ekonomi (miskin) berkaitan dengan jenis pekerjaannya. Dari hasil angket terhadap pekerjaan utama 60 responden yang ada di Arso Timur, Kabupaten Keerom dapat dilihat adanya keterbatasan SDM sebagaimana pada display data sebagai berikut.

Gambar 1. Pekerjaan Utama Responden



Sumber data Primer, 2016

Pada diagram Pekerjaan Utama Responden terlihat, bahwa 30 orang (50persen) penduduk yang bertempat tinggal di pemukiman yang ada di daerah perbatasan ternyata telah mempunyai pekerjaan sendiri, yaitu berkebun, sebagai buruh tetap 23 orang (38,33 persen), buruh tidak tetap 2 orang (3,33 persen), buruh pertanian tidak tetap 2 orang (3,33 persen), tidak bekerja 2 orang (3,33 persen), dan tidak jelas satu orang (1,66 persen). Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan, bahwa penghasilan mereka rendah atau sekitar RP. 85.000,-/bulan. Data ini menunjukkan fakta bahwa di daerah perbatasan sumber modal ekonomi masyarakat sangat terbatas.

Kebijakan III, melakukan perekayasa infrastruktur fisik perlu dilakukan, sebab infrastruktur fisik di Papua khususnya daerah pegunungan dan di perbatasan Papua-PNG masih tertinggal. Dalam pengetrapannya kebijakan III tetap harus memperhatikan/keadaan sosial budaya. Terkait kebijakan nasional tentang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, secara mendasar telah merubah peran dan fungsi aparat pemerintah dan masyarakat. Perubahan yang mendasar adalah sebagian kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai kewenangan otonomi daerah.

Kebijakan tersebut menuntut selain kesiapan dan kemampuan pelaksana pembangunan pada tingkat kabupaten/kota, juga menuntut adanya perubahan mendasar pada aspek manusianya, oleh karena itu perlu dibangun adalah komitmen, wawasan dan kemampuan (keberdayaan) masyarakat dalam pembangunan yaitu untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Departemen Sosial, 2002: 1-2). Pergeseran paradigma penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang memberi wewenang dan tanggungjawab secara luas kepada kabupaten/kota tersebut menunjukkan,

bahwa masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan di tingkat lokal pada wilayah kelurahan/desa, sementara pemerintah pusat dan daerah lebih menekankan pada fungsi pengaturan dan fasilitasi. Sejalan dengan pandangan ini, masyarakat di tingkat komunitas lokal sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dipandang mampu berperan melakukan identifikasi, mendeteksi, menyusun rencana aksi, dan tindakan awal secara efektif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Sejalan dengan kebijakan III, pembangunan jalan menuju daerah-daerah kecamatan perbatasan lainnya telah dibangun, demikian juga sarana penunjang pengembangan untuk kesejahteraan masyarakat seperti puskesmas, dan sekolah, sangat diperlukan karena keberadaannya masih terbatas di pusat pemerintahan kecamatan/distrik, sehingga masyarakat yang berada di daerah-daerah pedalaman desa di pegunungan-pegunungan belum sepenuhnya dapat mengakses, dan peluang usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seperti membuka warung disepanjang jalan yang telah dibangun belum nampak. Keterbatasan kehidupan masyarakat asli yang memanfaatkan sarana jalan untuk membuka sarana ekonomi tersebut terkait keterbatasan SDM dan permodalan, selain itu sarana jalan ke kampung-kampung di desa perbatasan yang sudah dapat dibuka belum diikuti sarana fisik jembatan yang baik, sehingga sarana transportasi umum dari luar komunitas untuk menjangkau pusat-pusat pemukiman masih menjadi kendala kelancaran kehidupan sosial ekonomi.

Kebijakan IV, yaitu kombinasi kebijakan II dan ke III merupakan pengembangan manusia dengan berwawasan pada pembangunan kerakyatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dengan cara meningkatkan pengetahuan, teknologi dan SDM.

Terkait kebijakan tersebut, model yang sudah ada yaitu KAT dapat dilakukan dan dikembangkan dalam rangka pembangunan berbasis masyarakat, dan pengembangan manusia pedalaman dengan didukung atau

menggunakan pengetahuan dan teknologi dari luar sebaiknya tetap dilakukan karena akan berdampak lebih baik.

b. Keaneragaman dampak akibat kondisi daerah.

Permasalahan sosial budaya, proses dan sistem pembangunan masa lalu ternyata mewariskan bentuk sikap sosial budaya masyarakat. Hal ini menjelmaberupafaham “kago” atau aliran “ratu adil”, yang efeknya tidak menguntungkan faham “kago” sekedar sebutan bukan sebuah organisasi, kata kago diambil dari kata cargo yang berarti peti atau kotak yang berisi barang berharga. Artinya faham ini untuk menyebut orang-orang yang pasif terhadap pembangunan, faham ini telah melekat pada sanubari sebagian masyarakat terkait pembagian “kue” pembangunan yang sama rata serta diilhami; bahwa pada suatu ketika ada masa kejayaan, dan menurut ramalan akan ada kedatangan kembali roh nenek moyang sebagai juru selamat atau ratu adil, (Koentjoroningrat, 1999: 135).

Dua sikap yang timbul. Pertama, golongan yang pasif terhadap pembangunan di lingkungannya sebagai bentuk rasa kecewa atas pembangunan yang dianggap belum membawa hasil kesejahteraan. Golongan ini mudah terseret oleh *trend* seperti minum-minuman keras. Kedua, golongan orang yang aktif menanggapi suatu masalah, perubahan atau pembangunan secara reaksioner, misalnya dengan demo dan kritikan terhadap pembangunan yang dilakukan di lingkungannya terlebih kalau pembangun tersebut tidak diikuti bantuan atau memberi efek manfaat kebutuhan pokok hidup. Sikap yang terbentuk merupakan dampak negatif dari pembangunan yang dirancang dari atas dan tidak memperhatikan konsep pengembangan manusia. Hal ini menjadi masalah dan faktor yang dapat menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan bila tidak diikuti pelayanan sosial berupa pemberdayaan dan pengembangan potensi yang menyentuh kualitas sumber daya manusia.

c. Model Pengembangan Manusia Pedalaman, melalui pemberdayaan KAT

Model pengembangan manusia pedalaman yang sudah ada adalah melalui pendekatan pemberdayaan KAT, pendekatan pemberdayaan KAT ini dilatarbelakangi adanya keterbatasan SDM. Berdasarkan peta KAT di pegunungan tengah dan di daerah perbatasan diketahui bahwa KAT yang belum tersentuh pemberdayaan masih cukup banyak, di Jayapura 2006 KK, Jayawijaya 2971 KK, Keerom 170 KK, Merauke 2085 KK, Pegunungan Bintang 2393 KK, Puncak Jaya 743 KK, Tolikara 653 KK, Yahokimo 2493 KK. Permasalahan yang dihadapi berupa jauhnya lokasi dan rendahnya kualitas hidup, hal ini karena keterbatasan kemampuan SDM di dalam mengakses pelayanan sosial dasar dan masih lemahnya sistem perlindungan atau jangkauan pemenuhan hak-hak dasar, serta semakin terkikisnya budaya lokal (Kemensos, 2012: 2). Untuk dapat mejangkau lokasi terkendala infrastruktur jalan ke pedalaman yang jelek, untuk menjangkau pusat kota Distrik saja dari pusat kota kabupaten diperlukan waktu satu setengah jam menggunakan mobil 4 x 4 (*Ford* atau sejenis *Jeep*, *Taft* dan *Hardtop*) sedang ke kampung-kampung yang terjauh dan merupakan lereng pegunungan yaitu kampung Wembi (42 Km). Apabila ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan 40-60 Km/jam dari pusat Kabupaten Distrik Arso Timur memerlukan waktu lebih kurang 100 menit, dan kampung Yamara (30 Km) diperlukan waktu tempuh sekitar 90 menit. Kondisi seperti ini mengakibatkan ketertinggalan penduduknya yang perlu akhirnya pengembangan manusia di daerah pedalaman menjadi terhambat.

Ketertinggalan pengembangan manusia di pedalaman pegunungan dan daerah perbatasan Papua-PNG terkait dengan berbagai masalah yang kompleks, dan tidak hanya fenomena geografis dan kondisi sosial budaya melainkan menyangkut berbagai hal seperti terbatasnya kemampuan mengakses pembangunan ekonomi, pendidikan, informasi dan transportasi. Sebagai Distrik yang berbatasan langsung dengan PNG, kecamatan di Arso Timur tidak

lepas juga dari masalah pelintas batas ke PNG, maka layanan sosial pola pemberdayaan KAT perlu dilakukan di pusat-pusat pemukiman yang menetap, seperti pemukiman pelintas batas di Waris, Pikere, dan Web.

Berdasarkan permasalahan spesifik daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan antarnegara, pendekatan pemberdayaan KAT yang dilakukan dalam rangka pengembangan manusia hendaknya mengacu pada kebijakan IV model G.O. Long, yaitu melaksanakan pembangunan koordinasi perlu terfokus pada empat hal, yaitu daya manusia, daya lingkungan, daya usaha dan daya kelembagaan. Model seperti ini (dalam Kemensos, 2012: 2) disebut Catur Daya, Pertama, daya manusia berkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, daya lingkungan berkait dengan penataan system lingkungan yang mampu meningkatkan mutu hidup, terlindungi hak dasar dan terpeliharanya budaya lokal sebagai salah satu unsur kearifan lokal.

Ketiga, daya usaha berkait dengan penataan sumber-sumber ekonomi yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Keempat, daya kelembagaan berkait dengan peningkatan kerja sama kelembagaan/ instansi lokal yang ada dalam kehidupan di lingkungannya. Dengan demikian, implementasi model pengembangan manusia pedalaman dengan pendekatan pemberdayaan KAT mengacu pada nilai dasar pemberdayaan manusia yang menghormati; a) peningkatan kualitas hidup dan memberi pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang memiliki hak untuk bekerja seperti berkebun di lahannya sendiri, dan penghidupan yang layak sebagaimana warga Indonesia pada umumnya; b) penghormatan atas hak dasar merujuk pada hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak berpartisipasi, hak untuk mendapat pendidikan; c) penghormatan atas tradisi dan budaya merupakan pengakuan atas hasil karsa dan karya yang telah dikembangkan secara turun menurun dengan memberi ruang gerak/peluang dan apresiasi atas segala bentuk karya sastra budaya masing-masing; d)

penghormatan atas lingkungan hidup diwujudkan dengan pengakuan dan memberi perlindungan atas lingkungan hidup dari gangguan pihak lain. Hal ini dapat terwujud jika pemberdayaan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG diarahkan pada kualitas SDM, lingkungan fisik dan sosial yang seimbang dengan usaha ekonomi seperti penciptaan mata pencaharian atau pendapatan penduduk, dan e) diharapkan bisa menjadi PANCA DAYA, yaitu pengembangan manusia pedalaman selain berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, penataan sistem lingkungan ekonomi, dan kerjasama kelembagaan, juga diarahkan pada penciptaan keberdayaan dalam hal seperti pelestarian budaya termasuk bahasa, pranata sosial, kesenian, nilai dan norma serta teknologi yang positif.

Tujuan model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan pembahasan dengan pemberdayaan adalah untuk menciptakan keberdayaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai arti pemberdayaan, yaitu membangun, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki (Ginanjar, 1998: 145). Dengan demikian model pengembangan manusia di daerah pedalaman berupa pelayanan sosial dengan pendekatan pemberdayaan KAT bertujuan melindungi masyarakat pedalaman dengan cara meningkatkan kemampuan mencegah dan mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi kemandiriannya untuk lepas dari ketergantungan dan dapat meletakkan prioritas/alternatif serta berperan dalam pembangunan.

Faktor resiko dari kondisi daerah sosial budaya dan proses pembangunan yang teridentifikasi sebagai penyebab Keterbelakangan SDM di pedalaman pegunungan dan perbatasan antarnegara dapat dilihat dari adanya indikasi.

a. Rumah-rumah penduduk belum sepenuhnya memenuhi syarat teknis kesehatan dan sosial, masih ada yang berdekatan dengan ternak yang mereka pelihara, fungsi rumah belum dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam keluarga belum

berfungsi baik, dan mereka lebih berorientasi pada perlindungan dari keganasan alam.

- b. Aspek ekonomi:
- c. Ternak yang mereka pelihara belum berfungsi ekonomi dan untuk kesehatan tapi lebih diutamakan sebagai status, jumlah babi yang dimiliki menunjukkan status sosial yang tinggi
- d. Dalam bercocok tanam masih dilakukan sederhana, dan belum dikelola secara baik. Motivasi usaha masih berorientasi untuk mencukupi kebutuhan pokok saja, belum memiliki akses jaringan pemasaran yang baik, dan pada umumnya hasil penen dikuasai oleh tengkulak, belum memiliki lembaga dan sarana pengelolaan sumber daya alam yang kuat, pengairan masih menggantungkan air sungai yang ada secara sederhana dan “tadah” hujan.
- e. Aspek Pendidikan, dari hasil wawancara diketahui bahwa pendidikan belum menjadi kebutuhan pokok sehingga mengakibatkan rendahnya motivasi untuk sekolah, terlebih keterbatasan tenaga pendidik dan sarana layanan seperti SLTP baru ada di daerah kecamatan menjadikan tingkat pendidikan rendah. Indikasi ini didukung data tingkat pendidikan di Arso Timur yang menunjukkan; bahwa 25,27 persen pendidikan penduduk belum sampai SD atau tidak tamat sekolah dasar. Permasalahan pendidikan ini merupakan permasalahan sumber daya manusia yang mengakibatkan daerah menjadi tertinggal.
- f. Aspek transportasi dan komunikasi, layanan transportasi dan komunikasi di daerah pegunungan dan perbatasan masih sangat terbatas, karena kondisi geografis sebagian besar sulit bahkan ada yang tidak terjangkau.

D. SIMPULAN

Pembangunan pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan Papua-PNG belum maksimal. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara. Pertama, pelayanan sosial dengan pendekatan pemberdayaan KAT hendaknya diarahkan untuk menciptakan keberdayaan manusia berkait peningkatan

SDM, penataan sistem lingkungan, ekonomi, kerjasama kelembagaan dan budaya. Kedua, alternatif model pengembangan manusia di daerah pedalaman perlu mengedepankan inisiatif, peran aktif, dan kreativitas masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi, sehingga secara mandiri dapat mengaktualisasi diri dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan memperhatikan adat budaya, dan kondisi yang rentan konflik, serta permasalahan yang dihadapi di daerah pegunungan wilayah perbatasan Papua-PNG, maka model kebijakan pembangunan perlu mengedepankan peran tokoh masyarakat dan kearifan local.

Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan sesuai kedudukannya yang dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar, oleh sebab itu peran tokoh masyarakat harus bersifat stabil. Beberapa ahli telah menguji peran, para ahli diantaranya Merfon (1998) menyebut peran sebagai *role set* artinya seperangkat peran, yang oleh Horton dan Hunt (1993) disebut *Role* merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status penting. Kozier Banbaru (1995) menyebut, bahwa peran adalah bentuk dari perilaku yang dapat diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu, sedang Abu Ahmadi (1982) menyebut peran sebagai suatu perilaku manusia dalam memecahkan kompleksitas masalah sosial atau memecahkan masalah mengharapakan manusia sebagai individu harus dapat berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsinya. (E. Supiandi, 2014). Dari pengertian ini, dan hasil penelitian maka penerapan pendekatan pemberdayaan KAT perlu didukung model pengembangan manusia di daerah pedalaman pegunungan dan perbatasan perbatasan Papua-PNG, kebijakan tersebut hendaknya diikuti peningkatan peran tokoh masyarakat sebagai *key people*.

Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Bapak Agus Salim selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Keerom, sumber data penelitian, redaksi, dan mitra bestari atas terselesaikannya dan terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. (2000). *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dean G. Praitt dan Jeffrey Z. Rubin. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Depsos. (2002). *Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Pusdatin Kesejahteraan Sosial
- _____ (2005). *Perkembangan Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta : Puslitbang UKS Balatbangkesos
- _____ (2011). *Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*. Jakarta : Balitbangkesos, Pusdatin Kesos
- Endro Winarno dkk. (2012). *Efektifitas Model Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Laboratorium Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu*. Yogyakarta: B2P3KS
- _____ (2016). *Poteret Kesejahteraan di Perbatasan, Analisis Permasalahan Sumber, Potensi Kesejahteraan Sosial di Kawasan Perbatasan*.
- Ginanjari Kartasasmita. (1998). *Martabat dan Kualitas Manusia dalam Global* . Yogyakarta; HIPSI
- Harry Hikmat dan Tim Social Policy Studies. (2006). *Pedoman Analisis Kebijakan Sosial*. Jakarta. UI-Kemensos
- Irawan Suhartono (1995). *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Umum Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Koentjaraningrat, 1996. *Irian Jaya, Membangun Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Jambangan
- Maria Hartiningsih, (2002). *Pemberdayaan Manusia di Indonesia, Supaya Tidak Membangun di Atas Pasir*, Jakarta, Kompas 24 Januari 2004
- Nasution. (2006).
- Pemkot Jayapura. (2004). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura*. Jayapura:
- SIL Internasional – Indonesia, 2004,